



Efektivitas Program Bps Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek

Naufal Afif Rachman¹, Ririt Iriani Sri Setiawati²

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 17 September 2023

Revised : 25 September 2023

Accepted: 02 Oktober 2023

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di bagian selatan dari wilayah Jawa Timur. Kabupaten yang memiliki julukan sebagai Kota Alen-alen ini rata-rata memiliki kepadatan penduduk yang tidak cukup besar. Hal itu disebabkan banyaknya masyarakat sekitar yang menetap dan memilih untuk mencari pekerjaan di luar Kabupaten Trenggalek untuk mendapatkan penghasilan yang cukup dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Tingkat kemiskinan di Kabupaten ini juga menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi hunian. Masih banyak rumah di Kabupaten ini yang memiliki kondisi tidak layak huni, baik dari faktor bangunan maupun kesehatan lingkungannya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memberikan solusi untuk memperbaiki kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Salah satu penerima bantuan ini adalah Kabupaten Trenggalek yang berada di Desa Rejowinangun dengan sasarannya yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Diharapkan dengan adanya program ini selain untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumahnya juga masyarakat sekitar lebih peka terhadap kebersamaan yaitu dengan cara gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan rumahnya serta program ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat agar semakin meningkat.

Keywords: *BSPS, MBR, Pertumbuhan ekonomi*

(*) Corresponding Author: naufalrachman316@gmail.com

How to Cite : Rachman N A, & Setiawati R I S. (2023). Efektivitas Program Bps Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8429906>

PENDAHULUAN

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Provinsi Jawa Timur, sekaligus mempunyai sebutan Kota Alen-Alen atau disebut juga Kota Gaplek yang berasal dari legenda Menak Sopal. Jumlah penduduk di kabupaten ini tiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif kecil atau bahkan cenderung stagnan, hal ini diakibatkan oleh kurangnya fasilitas yang kurang memadai dari segi apapun serta kurangnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, dapat dipastikan banyak perpindahan penduduk yang terus bergerak dinamis dari waktu ke waktu seperti mencari lapangan pekerjaan yang lebih menguntungkan yaitu di kota besar. Hal ini dibuktikan pada jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek yang stagnan dan relatif meningkat meski tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan hasil sensus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 menurut data sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek, jumlah penduduk di Kabupaten Trenggalek

hanya mencapai 731.125 jiwa.

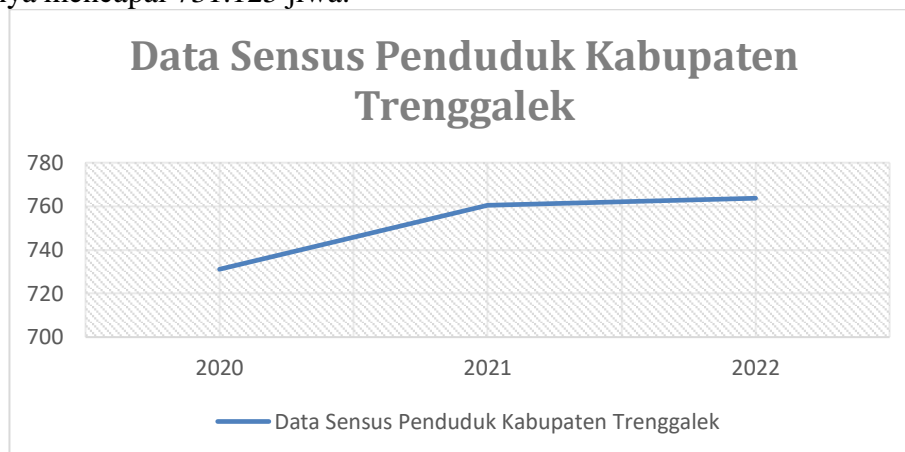


Diagram 1. Data sensus penduduk tahun 2020, 2021, dan 2022

Sumber: Badan pusat statistika (BPS)

Berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa di Kabupaten Trenggalek mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak begitu tinggi. Rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu Kabupaten akan berdampak terhadap menurunnya jumlah penduduk usia muda yang belum produktif. Angka ketergantungan Kabupaten tersebut juga akan berkurang karena beban hidup yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif menjadi lebih sedikit. Selain itu, lapangan pekerjaan tidak banyak karena SDA belum banyak dikelola sehingga tingkat kemiskinan menjadi masalah penting dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya kualitas mutu pangan serta kualitas rumah yang tidak layak huni. Permasalahan rumah tidak layak huni ini merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan sering menjadi masalah sosial yang lekat dengan kehidupan bermasyarakat baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Rumah tidak layak huni ini menjadi penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya tempat tinggal merupakan wadah bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Hal tersebut menjadi fokus utama bagi pemerintah khususnya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam menangani masalah vital ini. Oleh karena itu, Kementerian terkait membuat beberapa kebijakan salah satunya dibuatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.07/PRT/M/2018 Tentang BSPS, rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Namun rendahnya kualitas hidup masyarakat khususnya di bidang perumahan dan permukiman kumuh telah menimbulkan berbagai masalah social. Kelayakan rumah huni khususnya di Kabupaten Trenggalek masih banyak yang belum memenuhi standar layak huni baik dari segi kecukupan luas bangunan maupun akses sanitasi dan air bersih yang kurang memadai. Program ini diyakini akan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan ingin mendirikan rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni agar dapat bermanfaat hingga masa tuanya dan bagi penerusnya. Namun untuk mendapatkan bantuan ini terdapat beberapa kriteria

khusus agar bantuan ini sampai kepada masyarakat yang tepat dan benar-benar membutuhkan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dan pendapatan nilai produk domestik bruto yang terjadi dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini menggambarkan peningkatan taraf kehidupan kesejahteraan masyarakat yang dapat terukur dengan output riil. Adanya peningkatan ataupun perkembangan yang terjadi dalam suatu negara terlihat dari ekonomi fiskal, peningkatan fasilitas publik guna menunjang kebutuhan masyarakat, peningkatan industri dalam hal ini yaitu jumlah produksinya, peningkatan dan pemerataan kegiatan-kegiatan perekonomian, infrastruktur, dan lain-lainnya merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi negara khususnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Firmansyah 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau negara adalah akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, sumber daya manusia (human resources), di samping pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk mengelompokkan masyarakat yang memenuhi syarat dalam menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Salah satunya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau lebih dikenal dengan masyarakat kurang mampu yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Kondisi tersebut digambarkan pada tabel berikut.

Kecamatan	Jumlah masyarakat miskin
Panggul	10843
Dongko	9688
Pule	7868
Munjungan	6963
Tugu	6400
Gandusari	5767
Pogalan	5095
Kampak	4927
Durenan	4870
Bendungan	4730
Karangan	4399
Trenggalek	3988
Suruh	3847
Watulimo	3708

Tabel 1. Jumlah masyarakat miskin di Kab. Trenggalek

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas , beberapa kecamatan memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu kecamatan panggul sebesar 10843, Dongko 9688 jiwa dan Pule 7868 jiwa. Hal ini juga menggambarkan kualitas hidup masyarakat di kecamatan tersebut khususnya dalam hunian atau tempat tinggal tidak layak huni.

Oleh karena itu, Kabupaten Trenggalek mendapat perhatian dari Kementerian PUPR untuk mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan salah satunya adalah desa Rejowinangun, Kecamatan trenggalek, Kabupaten Trenggalek.

KAJIAN LITERATUR

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan. Program ini adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan yang diberikan berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yaitu berupa sejumlah dana untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah (Dewi Herliana, 2021)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli utamanya dalam peningkatan kualitas rumah sehingga berhak mendapatkan bantuan berupa dana ataupun sejenisnya dalam mewujudkan rumah yang layak huni.

Rumah Layak Huni (RLH)

Berdasarkan Permenpupr RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah layak huni.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan apapun yang digunakan dalam penelitian kualitatif, peneliti harus dapat memperhatikan dan memahaminya agar dalam mengungkap dan menggali subjek penelitiannya lebih tepat dan cocok sehingga hasilnya sesuai dengan tujuannya [Rijal Fadli, 2021].

Pendekatan studi kasus yaitu mendeskripsikan suatu latar belakang obyek atau suatu peristiwa tertentu dengan terperinci dan mendalam [Rahardjo, 2017]. Selain itu, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini dipilih karena terdapat kedekatan dan kemudahan informasi yang dapat diakses oleh peneliti serta adanya keterbatasan waktu dan tempat dalam melakukan penelitian.

Data yang digunakan peneliti adalah observasi dan wawancara. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang sedang diamati. Artinya, pengamatan yang dilakukan harus sesuai dengan fakta fakta yang terjadi di lapangan maupun teks.

Wawancara merupakan teknik pengolahan data dengan mengumpulkan data melalui responden dengan cara bertatap muka langsung yaitu melakukan

pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para informan. Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data [Fadhallah, 2020]. Dengan diadakannya wawancara diharapkan penulis dapat memperoleh informasi yang dibutuhkannya, sehubungan dengan penelitian tersebut maka diharapkan untuk menggunakan pedoman wawancara. Sehingga penelitian mengenai peran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten trenggalek lebih tepat menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk di Desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan acuan penghasilan dibawah UMK/UMP. Untuk Upah Minimum Kabupaten trenggalek sebesar Rp2.139.426 artinya, bagi masyarakat khususnya di Desa Rejowinangun yang memiliki penghasilan dibawah UMK Trenggalek termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga masyarakat tersebut memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan salah satu program dari Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas dari pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan BSPS membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menyediakan rumah yang layak huni.

Syarat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan SE Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah swadaya yaitu :

1. WNI yang sudah berkeluarga (penghuni rumah yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga)
2. Memiliki status kepemilikan atau penguasaan lahan yang resmi
3. Masyarakat Berpenghasilan rendah
4. Memiliki dan menghuni satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak huni
5. Belum pernah memperoleh bantuan sejenis untuk perumahan
6. Berkomitmen mengikuti ketentuan program

Penerima bantuan di desa Rejowinangun yang terpilih sebagai penerima program BSPS harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu diharapkan bantuan ini tepat sasaran terutama kepada masyarakat di desa Rejowinangun yang memiliki kondisi rumah yang tidak layak huni, seperti:

- Keselamatan bangunan, meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- Kesehatan penghuni, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana

pengawasan serta ketersediaan sarana dan utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

- Kecukupan minimum luas bangunan, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan.

Dari ketentuan diatas maka ditetapkanlah beberapa daftar nama penerima bantuan yang sudah memenuhi syarat di Desa Rejowinangun yaitu sebanyak 21 PB (Penerima bantuan).

Tabel 3.1 Daftar penerima bantuan di Desa Rejowinangun

NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
IRHAN FANANI	L	RT.006 RW.002 DUSUN KRAJAN
SUPRAPTI	P	RT.005 RW. 002 DUSUN KRAJAN
MUKANI	L	RT.007 RW.003 DUSUN SANTREN
NUR KOFIAH	P	RT.009 RW.003 DUSUN SANTREN
KASIYANTO	L	RT.011 RW.001 DUSUN KRAJAN
PONIRAN	L	RT.011 RW.001 DUSUN KRAJAN
MISENI	L	RT.001 RW.001 DUSUN KRAJAN
SUKIRAN	L	RT.001 RW.001 DUSUN KRAJAN
ENI SAFITRI	P	RT.001 RW.001 DUSUN KRAJAN
SARIP	L	RT.003 RW.002 DUSUN KRAJAN
DUKI HARIYANTO	L	RT.003 RW.002 DUSUN KRAJAN
ENI MURNAWATI	P	RT.004 RW.003 DUSUN KRAJAN
SLAMET	L	RT.011 RW.001 DUSUN KRAJAN
MARWOTO	L	RT.003 RW.002 DUSUN KRAJAN
IMAM MASHURI	L	RT.007 RW.003 DUSUN SANTREN
SAMURI	L	RT.008 RW.0003 DUSUN SANTREN
SUKARNI	L	RT.008 RW.0003 DUSUN SANTREN

Sumber: SK Kementerian PUPR Ditjen Perumahan provinsi Jatim 2023

Berdasarkan SK PPK Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 1826/KPTS/Rb9.4.3/2023 tentang penerima bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2023 Desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek dan Kabupaten Trenggalek, maka ditetapkanlah 21 nama sebagai penerima bantuan di Desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. 21 PB tersebut dianggap memenuhi syarat rumah tidak layak huni dan memenuhi kriteria penerima bantuan program BSPPS. Dari 21 PB tersebut mendapat dana dari program BSPPS sebesar

Rp.20.000.000 dengan rincian yaitu Rp.17.500.000 untuk bahan material dan Rp.2.500.000 sebagai upah tukang. Namun, persoalan yang dihadapi adalah kurangnya tukang dan kondisi cuaca bagi penerima bantuan yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan rumah tersebut. Akan tetapi, program ini mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak karena dianggap merupakan suatu program yang cukup efektif karena dapat membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah yang layak huni.

Dari segi ekonomi juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar khususnya di Desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Dapat dilihat dari adanya program BSPS ini ada beberapa pihak yang mendapat keuntungan dalam meningkatkan perekonomiannya, yaitu :

1. Penerima bantuan

Penerima Bantuan yang berada di Desa Rejowinangun selain untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya juga memiliki pengaruh dalam meningkatkan perekonomian mereka karena rumah yang mereka tempati sebelumnya tidak layak huni seperti atap, tiang yang rusak sehingga rawan terjadi musibah, kondisi lingkungan yang sebelum diperbaiki tidak bersih, tidak ada MCK (Mandi, Cuci, Kakus) Dengan adanya program BPS ini si penerima bantuan akan merasa nyaman ketika akan melakukan pekerjaannya dikarenakan kondisi rumah yang sudah layak huni akan berpengaruh terhadap kesehatan dan keamanan. Bahkan tidak jarang ada yang membuat lapangan pekerjaan baru dirumah mereka sendiri seperti toko kelontong di rumah yang sekarang layak dihuni. Selain itu, hubungan mereka dengan masyarakat yang lain menjadi lebih baik karena program ini juga meningkatkan hubungan sosial antara masyarakat dengan pemerintah, karena program ini langsung di sosialisasikan dan ditinjau oleh pegawai pemerintahan dan dibantu oleh masyarakat dan pekerja sosial lain nya. Ada juga beberapa rumah yang pekerjaannya di lakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat, sehingga dapat mengurangi biaya upah tukang. Dari kerja sama ini akan timbul relasi yang baik bahkan tak jarang akan saling menawarkan pekerjaan antara masyarakat dengan pemerintah setempat yang secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan mereka.

2. Tukang bangunan

Melalui program BPS ini dibutuhkan kinerja tukang bangunan untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni. Oleh karena itu, para tukang mendapatkan pekerjaan yang mungkin sebelumnya sepi pekerjaan apalagi jika tinggal di desa. Dari program BPS ini dana untuk upah tukang sebesar Rp.2.500.000 dengan jumlah rata-rata tukang di setiap rumah adalah 2 orang serta dibantu oleh tetangga sekitar, maka perkiraan jumlah tukang bangunan BPS di kecamatan Rejowinangun: $21 \text{ rumah} \times 2 \text{ orang} = 42 \text{ orang}$. Sehingga program BPS mampu memberikan 42 orang pekerjaan dengan perkiraan pendapatan setiap tukang bangunan yaitu $\text{Rp}2.500.000/2 \text{ orang} = \text{Rp}1.250.000 \text{ per orang}$. Dengan demikian, program BPS berperan dalam meningkatkan pendapatan tukang bangunan di kecamatan Rejowinangun.

3. Toko bangunan

Dari pihak program ini selain penerima bantuan dan tukang juga pemilik toko mengalami pertumbuhan ekonomi. Alasannya, karena dari BPS sendiri akan mengontrak toko selama program BPS ini berlangsung. Artinya, pendapatan toko

bangunan yang sebelumnya rendah akan semakin meningkat seperti ketika membeli semen yang harga satuannya pada tahun 2023 adalah Rp. 47.000.000. jika rata-rata penerima bantuan di Desa Rejowinangun yang berjumlah 21 rumah membutuhkan kurang lebih 40 semen maka, $40 \times 21 = 840$, $\text{Rp}47.000.000 \times 840 = \text{Rp}39.480.000$. Jadi, pendapatan hanya dari harga semen sebesar Rp39.480.000 belum dari bahan material lainnya seperti pasir, batu pecah, kuse, genteng, dan lainnya. Artinya, pendapatan toko bangunan juga mengalami peningkatan berkat adanya program BSPS ini.

KESIMPULAN

BSPS adalah dukungan dana dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan. Program BSPS yang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek khususnya di Desa Rejowinangun ini terbilang efektif dan mencapai sasaran sesuai dengan syarat-syarat penerima bantuan yang sudah ditentukan. Bantuan yang diberikan berupa uang sebesar Rp20.000.000 yang dibagi dengan rincian Rp17.500.000 untuk keperluan bahan material dan Rp2.500.000 sebagai upah tukang. Program BSPS ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Untuk masyarakat manfaat yang didapat yaitu:

- a. Menambah lapangan kerja di lokasi tersebut seperti, pelibatan masyarakat sebagai tukang dan gotong royong membantu pembangunan
- b. Usaha-usaha yang merupakan derivasi peningkatan kualitas rumah: Peningkatan/tumbuhnya usaha-usaha baru di bidang bahan bangunan seperti batu bata, kusen, genteng –maupun bidang bahan pabrikan seperti besi dan semen.

Bagi lingkungan adalah terbentuknya lingkungan yang bersih dan aman karena rumah yang sebelumnya tidak layak huni sekarang menjadi layak huni dan terawat selain itu, hubungan antar masyarakat menjadi lebih baik karena adanya asas gotong royong dan saling membantu pada saat proses pembangunan rumah berlangsung. Oleh karena itu, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dikatakan efektif karena selain membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun rumah layak huni juga memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diajukan beberapa saran yaitu bagi pemerintah pusat yang menangani bidang ini untuk meningkatkan jumlah kuota penerima bantuan di Kabupaten Trenggalek karena masih banyak rumah yang belum memenuhi standart rumah layak huni. Kedua, bagi pemda setempat yaitu Dinas PKPLH (Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup) serta tenaga fasilitator lapangan agar lebih meningkatkan sosialisasi terkait konsep dan tujuan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya khususnya di Kabupaten Trenggalek. Ketiga, bagi penerima bantuan di tahun/periode selanjutnya agar dapat meningkatkan keswadayaanya dan gotong royong antar tetangga dalam peningkatan kualitas rumah layak huni. Serta terakhir bagi program ini untuk terus dijalankan agar dapat mewujudkan rumah sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan membantu khususnya kepada dosen pembimbing dan mentor magang MSIB di Kabupaten trenggalek serta para tenaga fasilitator lapangan baik Teknik maupun Pemberdayaan yang sudah membimbing penulis selama kegiatan magang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Algiffari, M. F. (2023). Pendampingan Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Konawe Utara Pada Masa Pandemi Covid-19. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(3), 489-496.
- Apriliana, M. (2021). Akurasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap RTLH Menggunakan Metode Weighted Product. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 34-40
- Fadhallah RA. 2020. Wawancara, 1e. Jakarta Timur: UNJ Press. 1–55 p.
- Julianto, P. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto baru (2020). *Qawwam: The Leader's Writing*, 1(2), 1-12.
- KHAIRUNNISA, K., & NASRUDIN, N. (2019). PERANAN BSPS TERHADAP EKONOMI DAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(3), 742-759.
- Rahardjo M. 2017. Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. 1–26 p.
- Rijal Fadli M. 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika* 21: 33–54.
- R. Erdkhadifa, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Spatial Regression,” *IQTISHADUNA J. Ilm. Ekon. Kita*, vol. 11, no. 2, pp. 122–140, 2022, doi: 10.46367/iqtishaduna.v11i2.729.